

Review Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Oleh
Made Wahyu Saputra, I Made Pradana Adi Putra, Edy Sujana
Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Email : wahyusaputra_46@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi yang terbatas mengenai laporan keuangan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari penelitian yang dilakukan terdapat dua (2) tujuan utama dalam melakukan review laporan keuangan yaitu 1) memberikan informasi tentang kebenaran format dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 2) mengetahui apa saja yang menjadi ruang lingkup atas laporan keuangan dan melakukan review terhadap ruang lingkup dari laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Jenis penelitian data ini adalah data kualitatif berupa informasi tentang laporan keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan prosedur analitis dan permintaan keterangan. Dari hasil review dengan menggunakan prosedur analitis dan permintaan keterangan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: 1) format laporan keuangan dan ruang lingkup laporan keuangan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 2) masih terdapat kesalahan dalam pencatatan nilai ke dalam laporan keuangan. 3) ketidaksesuaian antara hasil permintaan keterangan dengan pencatatan laporan keuangan yang telah dilakukan.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Keuangan, Prosedur Analitis, Permintaan Keterangan.

Abstract

The purpose of this study is to provide limited information regarding the financial statements have been prepared by the Office of Civil Registration. From the research conducted there are two (2) main objective in conducting a review of financial statements that 1) provide information about the truth of the format in the preparation of the financial statements of Population and Civil Registration in accordance with Government Accounting strander. 2) find out what is the scope of the financial statements and review the scope of the financial statements in accordance with Government Accounting Standards. This type of data research is qualitative data in the form of information about the financial statements. Data was collected through observation method by observing and recording systematically investigated symptoms. The data were then analyzed with analytical procedures and inquiries. From the results of the review by using analytical procedures and inquiries obtained research results show that: 1) the format of the financial statements and the scope of the financial statements in accordance Government Accounting Standards which consists of budget realization report, balance sheet, cash flow statement, and notes the financial statements. 2) there are errors in recording the value in the financial statements. 3) discrepancy between the results of inquiries by recording the financial statements that have been made.

Key words: The Government Accounting Standards, Financial Statements, Analytical Procedures, Query Specification.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang telah disusun dan disampaikan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*) dan memberikan informasi tentang kebenaran laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini yang berjudul *Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 Sesuai Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*, metode analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini adalah laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terdiri dari penjelasan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan Keuangan dan wawancara mengenai kebenaran dari Laporan Keuangan yang telah disusun.

Laporan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu dilakukan review. Review itu dapat dilakukan dengan prosedur analitis dan permintaan keterangan atas laporan keuangan yang telah disusun. Review merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada di Laporan Keuangan yang telah disusun, permasalahan yang sering muncul dalam Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: 1) terjadi salah catat nilai/nominal dalam

laporan keuangan baik itu dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 2) terdapat hutang yang tidak wajar karena nominal hutang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat tinggi. 3) kurang lengkapnya penjelasan yang diberikan untuk menjelaskan suatu transaksi yang bermasalah seperti hutang yang dimiliki.

KAJIAN TEORI

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan SKPD Kepada Pemerintah Daerah dan Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang telah disusun dan disampaikan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Standar Akuntansi Pemerintah diatur bahwa format dalam penyusunan laporan keuangan harus meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sangat penting dilakukan karena dengan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, akan mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara ataupun Daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) faktor Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sering muncul karena disebabkan oleh SDM yang kurang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari kurang memadainya SDM di masing-masing SKPD adalah dalam penyusunan Laporan keuangan akan terjadi kesalahan

baik itu dalam bentuk salah catat angka ke dalam laporan keuangan, kesalahan format penyusunan laporan keuangan maupun kesalahan lain yang berpengaruh dalam melakukan pertanggungjawaban SKPD atas penggunaan APBD. Oleh sebab itu SDM yang memadai dimasing-masing SKPD adalah salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan yang berdampak kepada laporan pertanggungjawaban laporan keuangan SKPD kepada Pemerintah Daerah atas penggunaan APBD.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem Pengendalian Intern SKPD dalam hal ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan laporan keuangan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sistem Pengendalian Internnya sudah cukup baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan kewenangannya di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan baik, selain itu tugas pokok yang dijalankan yaitu bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil telah terlaksana dengan baik. Dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2012 telah berjalan dengan baik dilihat dari terlaksananya pelayanan dan sosialisasi KTP, KK, dan Akta catatan sipil kepada masyarakat sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memperoleh pendapatan asli daerah maupun belanja daerah yang menunjang kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Sub Bagian Keuangan telah menyusun laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mencakup laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh Sub Bagian Keuangan, dinas kependudukan dan catatan sipil masih terdapat kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan sehingga berdampak pada pemberian opini bahwa laporan keuangan yang telah disusun keandalan informasinya masih diragukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang baik dimasing-masing SKPD sangat berpengaruh terhadap efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan laporan keuangan demi terciptanya pemerintah yang baik (*good governance*).

Manfaat dan Peran Penting Review Laporan Keuangan Bagi SKPD

Review laporan keuangan sangat bermanfaat dan berperan penting dalam memberikan informasi atas laporan keuangan yang telah disusun oleh masing-masing SKPD dalam hal ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Review laporan keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis untuk memberikan informasi terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material atas laporan keuangan agar laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ruang lingkup dari review laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Manfaat yang dihasilkan setelah dilaksanakannya review atas laporan keuangan yaitu memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP yang terdiri dari laporan arus kas, neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan, selain itu bermanfaat sebagai bahan referensi sehingga kedepannya tidak terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Selain bermanfaat, review laporan keuangan berperan penting dalam memberikan informasi mengenai ruang

lingkup dari review laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan selain itu dengan melakukan review dapat mengungkap kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah disusun baik itu berupa salah catat atau kesalahan lainnya dalam penyusunan laporan keuangan. Dari uraian diatas mengenai review laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa review laporan keuangan memberikan manfaat dan berperan penting dalam memberikan ilmu dan informasi untuk setiap SKPD mengenai laporan keuangan yang sesuai Peraturan Pemerintah demi mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu dari laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2012.

Metode Analisis Data Prosedur Analitis

Dalam menganalisis data prosedur analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara akun dan kejadian yang tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Analisis yang dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian laporan keuangan, kesesuaian dan keterkaitan antara komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen lainnya. Berikut ini adalah hubungan antara komponen laporan keuangan atau lampirannya dalam Prosedur Analitis, antara lain: 1) Hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Hubungan antara laporan/ daftar Aktiva Tetap yang dibuat oleh Bagian Akuntansi dengan Bagian Umum/ Pengelola Barang/ Aset, 3) Menganalisis laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan (SAP), 4) Memperoleh laporan dari Inspektorat/ aparat pengawasan intern pemerintah lain, jika ada yang telah melakukan audit atau Review atas laporan keuangan.

Permintaan Keterangan/wawancara

Dalam review laporan keuangan, permintaan keterangan sangat penting dilakukan, permintaan keterangan yang dilakukan dalam review atas laporan keuangan tergantung pada pertimbangan mengenai kebenaran informasi laporan keuangan yang telah disajikan. Permintaan keterangan dilakukan jika dalam proses penelusuran angka dan penelusuran lainnya terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil dari tanya jawaban berupa jawaban Ya, Tidak, dan TB (Tidak Berlaku) untuk masing-masing pos dalam laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, mengamanatkan bahwa dalam melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menyusun laporan keuangannya telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, dimana laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prosedur Analitis

Dalam Prosedur Analitis laporan keuangan terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian dalam melakukan review, berikut ini merupakan hasil dari teknik prosedur analitis atas laporan keuangan:

Hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dari review yang telah dilakukan mengenai hubungan penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran, tidak terjadi salah catat di Neraca maupun di Realisasi Belanja Modal karena telah sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada di SP2D (Jumlah Belanja Modal) yang telah diperiksa oleh Bendahara Umum Daerah dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil serta daftar mutasi Aset Tetap yang disusun Pengurus Barang dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti-bukti yang dilampirkan merupakan hasil dari pemeriksaan BPK.

Hubungan antara laporan/ daftar Aktiva Tetap yang dibuat oleh Bagian Akuntansi dengan Bagian Umum/ Pengelola Barang/ Aset. Dari review yang telah dilakukan, daftar Aktiva Tetap yang dibuat Oleh Bagian Akuntansi dengan Pengelola Barang tidak terdapat perbedaan. Itu bisa dilihat dari daftar Aktiva Tetap di Neraca dengan daftar mutasi Aset Tetap yang disusun oleh Pengurus Barang dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sesuai daftar inventaris yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana sebelumnya telah diperiksa oleh BPK.

Menganalisis laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan (SAP). Dari review yang telah dilakukan, terdapat salah catat maupun bukti yang kurang memadai di dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi anggaran, dalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat kesalahan catat yang dilakukan SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan, yaitu: a) Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (tidak langsung), Belanja Pegawai (langsung), dan Belanja Barang dan Jasa. Pada Belanja Pegawai (langsung) terdapat salah catat jumlah SP2D Belanja Barang Jasa (UP/ GU), dimana nilai yang sebenarnya dalam lampiran SP2D Rp

15.625.000,00 dicatat sebesar Rp 17.010.000,00. b) Sedangkan dalam Belanja Barang dan Jasa tidak terdapat bukti yang menjelaskan bahwa di SPJ untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 17.010.000,00. Dimana sebelumnya laporan Belanja Barang dan Jasa ini telah diperiksa oleh Bendahara Umum Daerah maupun oleh BPK dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil tetapi setelah dilakukan review terbukti masih terdapat salah catat. 2) Neraca, dalam Neraca terdapat kesalahan catat yang dilakukan SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan, yaitu: a) Dari penyusunan Neraca terdapat kesalahan catat atas nilai Aset Lain-lain, dimana nilai Aset Lain-lain dalam Neraca dicatat sebesar Rp 194.704.645,86 sedangkan nilai Aset Lain-lain yang benar terdapat dalam rincian Aset Lain-lain table sebesar Rp 194.704.645,87. b) Dari Kewajiban terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya yang sangat besar. Dimana utang ini merupakan saldo Utang Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2012 yang berasal dari saldo Utang Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2011. Terdapat saldo utang tahun 2012 kepada pihak ketiga sebesar Rp 705.651.303,00. 3) Laporan Arus Kas, berdasarkan data penelitian, laporan arus kas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa: a) Penerimaan dari Aktivitas Operasi terdiri dari Pendapatan Retribusi Kartu Keluarga, retribusi Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, dan Dokumen lain dengan jumlah sebesar Rp 1.667.820.000,00. Data penerimaan dari Aktivitas Operasi telah sesuai dengan SPJ Pendapatan Fungsional yang dilaporkan oleh Bendahara Penerima mengetahui Pengguna Anggaran. b) Pengeluaran dari Aktivitas Operasi terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan jumlah sebesar Rp 5.417.392.137,00. Dalam Belanja Operasional masih terdapat kesalahan catat dalam Belanja Pegawai (langsung) serta Belanja Barang dan Jasa walaupun telah diperiksa oleh Bendahara Umum Daerah maupun oleh BPK dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 4) Catatan Atas Laporan Keuangan, dalam

penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan dengan baik. Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah disusun meliputi penjelasan atau daftar terinci suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai: a) Penjelasan umum mengenai laporan keuangan, b) Kebijakan keuangan, ekonomi makro, dan Pencapaian target kinerja APBD, c) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, d) Kebijakan Akuntansi, e) Penjelasan Laporan pos-pos keuangan. f) Penjelasan atas informasi non keuangan.

Memperoleh laporan dari Inspektorat/ aparat pengawasan intern pemerintah lain, jika ada yang telah melakukan audit atau Review atas laporan keuangan. Dari hasil review yang dilakukan oleh Inspektorat pada laporan keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hanya dalam bentuk kalimat secara umum tentang hasil laporan review laporan keuangan SKPD. Seperti laporan hasil review laporan keuangan SKPD Tahun 2012 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor: 700/ 202/ Inspektorat.

Permintaan Keterangan

Dari hasil Permintaan Keterangan yang telah dilakukan kepada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu melalui keterangan Sub Bagian Keuangan, didapatkan hasil bahwa setiap transaksi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dalam penyusunannya tidak terjadi kesalahan, tetapi dari hasil review dalam pencatatan angka-angka ke dalam laporan keuangan baik di Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca masih terjadi kesalahan catat. Berikut ini adalah perbedaan yang terjadi antara hasil Permintaan Keterangan dengan hasil review Laporan Keuangan: 1) Pada Aktiva Lain-lain sudah diklasifikasikan dengan benar, namun dari pencatatan nilai Aktiva Lain-lain yang telah dilakukan masih salah. 2) Pada Utang Usaha dan Biaya yang masih harus dibayar sudah diklasifikasikan

dengan benar, namun utang jangka pendek yang dimiliki dapat dikatakan tidak wajar. 3) Pada Pendapatan dan Belanja sudah diklasifikasikan dan diakui dengan tepat, namun dari pencatatan nilai Belanja yang telah dilakukan masih salah.

Pembahasan

Dari penelitian tentang review laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2012 terdapat beberapa temuan mengenai penyusunan laporan keuangan maupun pencatatan angka-angka dalam laporan keuangan. Hasil dari penelitian review tersebut yaitu:

Format Laporan keuangan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2012 telah sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dimana Format Laporan Keuangan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ruang lingkup dari review Laporan Keuangan yang telah dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur bahwa ruang lingkup dalam melakukan review mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ditinjau dari pencatatan nilai atau angka-angka dalam Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan masih belum teliti di dalam memasukkan angka-angka yang ada di bukti-bukti transaksi penggunaan APBD. Kesalahan dalam memasukkan angka-angka itu bisa dilihat dari masih terdapat perbedaan angka yang dicatat dalam laporan keuangan dengan bukti-bukti transaksi yang ada berdasarkan temuan dari review laporan keuangan yang telah dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Simpulan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tahun 2012 adalah: 1) Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dimana pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan dan Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran. 2) Basis Akrual (*accrual basis*) untuk menyusun Neraca, dimana Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui serta dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian maupun kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Laporan Keuangan yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu berupa: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu laporan yang memiliki dua (2) pos utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan belanja daerah. 2) Neraca yaitu informasi mengenai posisi keuangan berupa Aset (harta), Kewajiban (hutang) dan Ekuitas Dana pada saat (tanggal) Neraca tersebut diterbitkan. 3) Laporan Arus Kas (LAK), dalam LAK terdapat dua (2) aktivitas utama yaitu Pendapatan Retribusi serta Belanja Operasional dan Belanja Modal. 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yaitu penjelasan lebih rinci atas elemen-elemen yang terdapat dalam Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan penyajian secara umum terkait laporan keuangan).

Dari hasil review laporan keuangan dengan teknik Prosedur Analitis, terungkap bahwa masih terdapat kesalahan dalam memasukkan angka-angka ke dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang telah disusun oleh SKPD Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dari hasil Permintaan Keterangan yang telah dilakukan kepada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu melalui keterangan Sub Bagian Keuangan, didapatkan hasil bahwa setiap transaksi telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dalam penyusunannya tidak terjadi kesalahan, tetapi dari hasil review dalam pencatatan angka-angka ke dalam laporan keuangan baik di Laporan Realisasi Keuangan dan Neraca masih terjadi kesalahan catat.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil peneliti hanya melakukan penelitian terhadap laporan keuangan yang telah disusun Sub Bagian Keuangan. Bukti-bukti atas transaksi yang telah dilakukan baik itu pendapatan dan pengeluaran yang telah dilakukan hanya sebatas rincian yang telah dilampirkan dalam laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rincian secara menyeluruh mengenai laporan keuangan yang telah disusun tidak dapat dilampirkan secara terperinci dikarenakan laporan keuangan masih bersifat rahasia sehingga hanya rincian secara terbatas dalam laporan keuangan yang dapat dilampirkan. Selain itu peneliti membatasi penelitian laporan keuangan hanya sebatas melakukan review terhadap laporan keuangan yang telah disusun tanpa meneliti secara terperinci seperti melakukan audit.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian tentang review laporan keuangan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Untuk tahun berikutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

diharapkan tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan dalam rangka menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Untuk tahun berikutnya dalam penyusunan Laporan Keuangan diharapkan SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Sub Bagian Keuangan harus lebih teliti dalam penyusunan laporan keuangan karena dalam pencatatan angka-angka di dalam laporan keuangan masih terjadi salah catat baik berbentuk material maupun non material. Sehingga kedepannya diharapkan tidak terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Untuk tahun berikutnya diharapkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil tidak melakukan Belanja atau melakukan transaksi yang mengakibatkan timbulnya utang kepada pihak ketiga karena pada tahun 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah berani mengambil keputusan untuk melakukan utang kepada pihak ketiga tanpa adanya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang di setujui maupun yang telah dianggarkan sehingga terdapat saldo utang di tahun 2012 dan tidak terdapat anggaran untuk melunasi utang di tahun 2012.

REFERENSI

- Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan BPK RI. 2007. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan*. Denpasar.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. 2012. *Laporan Keuangan*. Buleleng.
- Endah Noviani. 2010. *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan)*. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ke-4.
- Ichsani, Mochamad. Inspektur Kementerian BUMN. 2010. *Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Asersi Final) Tahun Anggaran 2009*. Jakarta.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke-13. Edisi Ke-6. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil*. 2011. Buleleng.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2005. Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. 2012. Bali.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Silka Hartina. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006. Administrasi Kependudukan*. 2008. Bali.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008. Pemerintah Daerah*. 2012. Bali.